



MENCEGAH KONFLIK SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

 I Wayan Redana¹
¹Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Udayana, Denpasar
 E-mail: iwayanredana@yahoo.com

Abstrak. Konflik sosial dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan harus dihindari. Konflik yang berkelanjutan yang berawal dari pro dan kontra teknologi akan mengakibatkan social cost yang amat luar biasa tinggi. Persatuan Insinyur Indonesia dalam etika profesi menyebutkan bahwa insinyur senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Hal ini berarti bahwa insinyur senantiasa menghindari konflik kepentingan atau pro dan kontra pemilihan suatu teknologi yang akan dibangun. Elemen konflik meliputi : Pemicu yang dianalogkan dengan api; akselerator yang dianalogkan dengan angin panas; dan akar konflik yang dianalogkan dengan rumput kering. Umumnya, terdapat lima tahap eskalasi konflik yaitu: Sengketa, Ketegangan/mobilisasi, Krisis, Kekerasan terbatas, Kekerasan massal, dan Penurunan eskalasi konflik. Semua hal diatas tidak akan terjadi lebih kelam, apabila melalui proses kajian kelayakan, perencanaan yang jelas dan berkaitan dengan etika, moral, aturan, budaya, dan kepentingan sosial. Eskalasi konflik dilawankan dengan de-eskalasi konflik yaitu konflik dilawankan dengan pembangunan damai yang pada akhirnya akan sampai kepada pemilihan teknologi tepat guna yang memberi rasa damai kepada masyarakat luas. Rumusan masalah studi ini adalah bagaimana tren konflik yang terjadi dan bagaimana cara menyikapi pro-kontra rencana pembangunan infrastruktur. Tujuan tulisan adalah mengungkap tren konflik yang terjadi, mengedepankan nilai budaya, mengedepankan posisi sebagai analis dan mengedepankan tatanilai etika dan moral dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Metodologi yang dipakai adalah mengamati jalannya suatu pro dan kontra, menganalisis data sekunder hasil kajian infrastruktur. Beberapa kasus yang dibahas antara lain Studi kelayakan Jalan Tohpati Kusamba, Jalan Sunset, reklamasi Teluk Benoa, Taman nasional Tesso Nilo, Kerinci Seblat, Kayan Mentarang, Kutai dan Sebangau. Simpulan dan saran dari kajian ini adalah bahwa nilai Sosial Budaya melalui fokus group discussion harus dikedepankan dan menjadi faktor penentu, disamping kelayakan secara Hukum, Lingkungan, Teknis, dan Ekonomi sesuai dengan prasyarat suatu kajian infrastruktur berkelanjutan.

Kata kunci : aspek sosial teknologi, pro-kontra teknologi, teknologi berbudaya, teknologi tepat guna

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pro dan kontra dalam suatu pembangunan infrastruktur sering terjadi. Pro dan kontra yang amat tajam akan bermuara pada suatu konflik sosial. Sesungguhnya, konflik ini bisa dihindari, asal semua pihak dapat saling memberi dan menerima. Pembangunan suatu infrastruktur seharusnya mengikuti tahapan yaitu tahap prastudi, tahap kajian kelayakan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahapan tersebut tidak boleh saling mendahului atau saling menabrak hal yang satu dan lainnya. Pemerintah seharusnya lebih awal hadir dan selalu menjalin komunikasi dengan warga. Pihak manapun tidak boleh memaksakan kehendak sendiri. Konsep kemajuan teknologi yang berkelanjutan, *sustainable technology development* seharusnya mengandung arti bahwa setiap orang yang terkena dan terlibat dalam perubahan tersebut dapat menerima bahwa kemajuan infrastruktur masih dalam arah yang diinginkan, dimana semua orang

setuju bahwa perubahan tersebut sangat diperlukan, diinginkan dan apabila kembali dievaluasi setelah berjalan beberapa tahun, semua orang masih setuju bahwa perubahan tersebut sangat berguna, walau terjadi beberapa akibat negatif dari perubahan tersebut dan tetap merupakan suatu kemajuan secara umum.

Tulisan ini mengemukakan beberapa contoh kasus kajian pembangunan infrastruktur bermasalah maupun tidak bermasalah. Kasus yang ditinjau adalah kajian kelayakan jalan Tohpati Kusamba dan Sunset Road, bendungan bawah tanah, reklamasi teluk benoa, tren konflik dari lima taman nasional di Indonesia yaitu Tesso Nilo, Kerinci Seblat, Kayan Mentarang, Kutai dan Sebangau

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang mengemuka adalah: bagaimana tren konflik yang terjadi didalam suatu kajian pembangunan infrastruktur, bagaimana cara menyikapi suatu pro dan kontra yang tajam dalam pembangunan

infrastruktur.

C. Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah mengemukakan suatu gagasan untuk menghindari konflik sosial dalam pembangunan infrastruktur dengan mengungkap: tren konflik yang terjadi, menyelesaikan konflik dengan pendekatan nilai budaya melalui FGD, mengedepankan posisi sebagai analis pada suatu konflik pro dan kontra dan mengedepankan tatanilai etika dan hak moral dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

II. METODOLOGI

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisa konflik pro dan kontra dalam kajian kelayakan pembangunan infrastruktur jalan Tohpati-Kusamba, Jalan Sunset Road, bendungan bawah tanah, reklamasi teluk Benoa, dan konflik kehutanan di lima taman Nasional.

B. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dari laporan kajian infrastruktur jalan, bendungan bawah tanah, reklamasi teluk Benoa dan konflik di lima taman nasional.

C. Metode Analisis Data

Data berupa laporan kajian kelayakan infrastruktur dianalisis menggunakan bagan alir teknologi berwawasan budaya (Redana dan Suparsa, 2014), nilai filsafat ilmu, tata nilai moral dan etika, Lima prasyarat kelayakan yaitu Hukum, Sosial Budaya, Lingkungan, Teknis, dan Ekonomi dan kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik (Malik dkk, 2014)

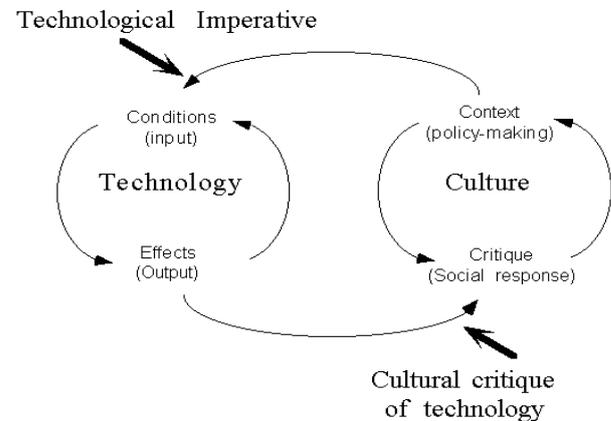
III. KAJIAN PUSTAKA

Lebih baik mencegah dari pada mengobati, demikian kata-kata bijak yang perlu disikapi dengan wajar. Sengketa, atau konflik berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan tidak bagus. Persatuan Insinyur Indonesia dalam salah satu etika profesi menyebutkan bahwa insinyur senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya (PII, 2015). Pembangunan infrastruktur yang tidak mengalami konflik akan dapat memperlihatkan konsep kemajuan untuk semua orang sampai akhir jaman. Untuk itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya memandang segi teknis, tetapi harus memandang sisi ekonomi, politik, social dan budaya dan terikat pada nilai etika dan moral.

A. Teknologi dan Budaya

Ilmu menemukan, teknologi menerapkan, masyarakat menyalurkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga, teknologi yang diterapkan sesuai dengan

konteks teknologi tersebut di masyarakat. Hubungan problematik antara teknologi dan budaya digambarkan seperti pada Gambar 1. Teknologi atau infrastruktur yang diterapkan akan selalu mendapat kritik budaya. Adaptasi akan terjadi apabila teknologi tersebut sudah bersesuaian dengan budaya, dan teknologi yang diterapkan akan menjadi teknologi tepat guna.



Gambar 1. Hubungan problematis antara teknologi dan budaya (Baark dan Jamison, 1986)

B. Filosofi

Landasan filsafat dalam pengembangan pemikiran, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan pengembangannya dalam kehidupan nyata.

- Landasan Ontologis, yaitu ada atau keberadaan. Ontologi, terbagi atas dua, yaitu ontologi umum yang disebut metafisika, dan ontologi khusus, seperti, Kosmologi, Theodice, dan sebagainya.
- Landasan Epistemologi, Epistemologi artinya pengetahuan tentang pengetahuan, atau filsafat pengetahuan yang harus dinaturalisasi dengan spirit ilmiah. Epistemologi setidaknya menghadapi dua metafora, yaitu: (1) metafora “given”, contoh bangunan piramid yang memperlihatkan teori yang kuat, dan rasional. (2) metafora “fragile” yang akhirnya membentuk rasa skeptis contoh perahu, atau pesawat terbang yang menolak teori given.
- Landasan Aksiologi, Aksiologi yang berasal dari kata Yunani *axios* yang artinya guna atau bernilai (Suriasumantri, 2000). Infrastruktur harus berguna dan sesuai dengan kaidah-kaidah moral dan profesionalisme.

C. Ukuran Nilai: moral, norma, etika dan estetika moral

Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai akhlak, akhlak dan budi pekerti; moral adalah kondisi mental yang mempengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, berani, disiplin dan sebagainya. Sementara akhlak merupakan kelakuan tabiat, tingkah laku.

Realisme moral diterapkan pada pengambilan sikap keputusan pada etika dan pada nilai, hak, kewajiban dan sebagainya. Realisme moral menginspirasi dalam

pengambilan sikap keputusan etika dalam mempertahankan objektifitas. Lawan dari moral realisme adalah relativisme dan subjektifitas. Moral realisme juga dapat mengaplikasikan kebenaran moral dengan logika matematika, yang pada akhirnya matematika dapat merepresentasikan hukum alam.

Penerapan kebenaran moral sering menghadapi dilema, pada setiap keputusan yang diambil akan menyalahi aturan moral lainnya. Keputusan apa pun yang akan diambil, akan melakukan sesuatu yang secara etika moral salah, atau semestinya tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, dilema dapat dipandang bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang paling baik dari alternatif keputusan yang ada. Dilema Konstruktif jauh lebih baik dari dilemma Destruktif. Secara logika matematika, argumen deduksi silogisme untuk menguji validitas dilema bisa dipakai yang pada akhirnya akan merepresentasikan matematika atau hukum alam.

1. Norma

Norma adalah suatu aturan perilaku atau pola perilaku difinitif, berawal dari penyerahan seseorang kepada sesuatu yang disangkakan dan dikenal adanya norma gramatikal, norma moral, norma *etiquette* dan sebagainya dan hampir semua perilaku manusia berdasarkan norma. Secara alami sumber dari norma, bentuk norma, merupakan ketentuan dasar etika dan filsafat.

2. Etika

Etika dalam bahasa Inggris disebut *ethics* yang berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti karakter. Etika merupakan konsep yang meliputi alasan praktis seperti: baik, benar, tugas, kewajiban, *virtue* (kebaikan), kebebasan, rasionalitas, pilihan. Juga meliputi *second-order study*, yaitu objektivitas, subjektivitas, relativisme, skeptisisme. Etika juga berkenaan dengan moral dan dibedakan setidaknya dua macam (Blackburn, 1996) yaitu:

- Etika *deontologis* mengarahkan perhatian kepada persoalan kewajaran, keadilan dan kewajiban.
- Etika *teleologis*, sebaliknya mengarahkan perhatian kepada kebahagiaan, kesenangan. Bentuk-bentuk etika *teleologis* adalah: hedonisme, utilitarian, dan egoisme.

Hedonisme etis menghasilkan suatu norma untuk menilai kebenaran dan kesalahan moral dari suatu tindakan. Hedonisme etis misalnya utilitarianisme aturan meyakini bahwa tindakan adalah benar jika memenuhi aturan moral tertentu, misalnya "janji harus ditepati". Egoisme dibagi menjadi dua, yaitu:

- Egoisme etis memandang bahwa kepentingan diri yang rasional merupakan norma untuk menilai kebenaran atau kesalahan moral suatu tindakan yang akhirnya berlawanan dengan hedonisme.
- Egoisme psikologis di lain pihak memandang bahwa manusia dari kodratnya selalu mementingkan diri dan tidak pernah mampu menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri, yang berlawanan dengan altruisme yang meyakini bahwa paling tidak dalam

suatu waktu menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri.

Etika juga dapat dipandang dari sudut:

- Etika normatif, mengandalkan sebuah norma untuk membimbing perilaku, yaitu sebuah prinsip pengatur sebagaimana etika, agama atau politik.
- Etika absolut, memandang bahwa paling tidak ada satu norma atau aturan moral yang mengikat semua manusia.
- Etika relatif, lawan etika absolut dikenal sebagai:
 - Relativisme etis, bahwa kebenaran atau kesalahan moral adalah tindakan berbeda dari satu budaya ke budaya yang lain atau dari satu individu ke individu yang lain.
 - Relativisme kultural, bahwa norma-norma moral berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lain dan mengesampingkan norma moral yang universal.

Dalam teori idealisme oleh Kant (1724-1804) disebutkan bahwa etis adalah cita-cita manusia yang diarahkan kepada tingkah laku dan kesucilaan. Kesucilaan berdasarkan kemerdekaan pada pilihan baik dan buruk. Bertindak baik tidak akan berguna, apabila tidak ada ketidakmatian jiwa dan ketidakmatian akan jiwa ini akan menuntut adanya Tuhan. Kembali lagi bahwa Tuhan yang dapat memberikan upah kepada manusia yang benar-benar berbuat baik.

3. Estetika

Estetika adalah bagian filsafat yang mengkaji dan membicarakan tentang seni dan keindahan, tanggapan kepekaan terhadap keindahan dan tidak lupa sumber keindahan adalah Tuhan Yang Maha Esa.

D. Hak dan Kewajiban

Hak mempunyai arti benar, milik, kepunyaan. Hak merupakan kewenangan, kekuasaan melakukan atau berbuat sesuatu. Dalam membicarakan tanggung jawab, tidak bisa lepas dari hak dan kewajiban. Dalam pemerintahan yang baik hak dan kewajiban harus berjalan dengan baik, sebagai bentuk penghargaan umumnya disebut *reward* dan *punishment*. Hak dalam bahasa Inggris disebut *rights* mempunyai beberapa bentuk sebagaimana dijelaskan oleh McLean (1989), yaitu hak natural, hak moral dan hak legal.

1. Hak Natural (*Natural rights*)

Natural right adalah hak yang dipunyai seseorang secara alamiah, yaitu tanpa adanya pengaruh oleh suatu kesepakatan, institusi legal dan politik. *Natural right* dipunyai oleh setiap orang tanpa memandang waktu dan tempat. Lawan dari *natural right* adalah positif *right* yaitu hak yang ditentukan oleh sistem intitusi legal. Walaupun demikian, *natural right* dianggap masih tetap ada dan merupakan hadiah Tuhan. *Natural right* merupakan hak tentang keberadaan manusia serta bersifat alami dan universal dan berperan memberi arah kepada sistem institusi legal.

2. Hak Moral (*Moral rights*)

Moral right merupakan hak moral yang seharusnya dikenal dan diperhitungkan oleh sistem institusi legal, walaupun moral right tidak bersifat universal, tetapi

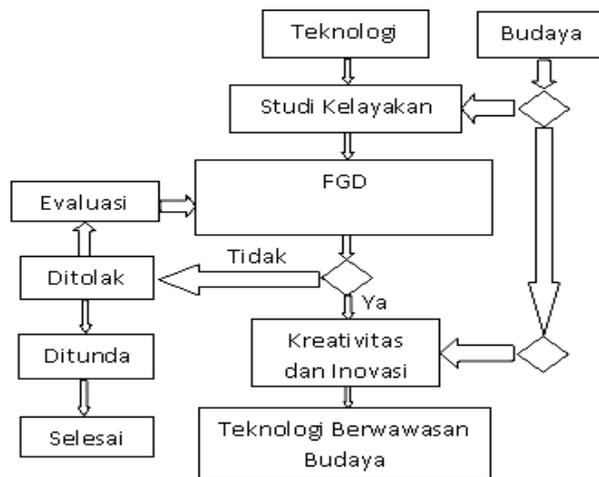
setidaknya dikenal dan diperhitungkan dibawah keadaan setempat.

3. Hak Legal (Legal rights)

Legal right adalah hak yang dinyatakan dalam hukum positif.

E. Kajian Kelayakan

Pembangunan Infrastruktur diharuskan melalui beberapa tahapan antara lain, Pra kajian Kelayakan, Kajian Kelayakan, Studi LARAP, Pra rencana, Perencanaan atau desain, Revisi perencanaan (bila diperlukan), tahapan konstruksi dan pemeliharaan, Tracer Studi. Bagan alir teknologi berwawasan budaya sebagaimana Gambar 1.



Gambar 2. Bagan alir teknologi berwawasan budaya (Redana dan Suparsa, 2014)

F. Pro dan Kontra

Pro dan Kontra atau Kontroversi yaitu pro (menyetujui) dan kontra (menolak) penerapan suatu teknologi. Perdebatan mengenai penerapan teknologi dapat meluas, dan menjadi perdebatan publik secara terbuka. Walau perdebatan sudah melebar ke berbagai aspek keilmuan dan ke masyarakat luas, tetapi gambaran perdebatan pro-kontra sama saja bentuknya.

Dalam perdebatan publik seperti itu dapat dikategorikan tiga *group* yang mempunyai pandangan yang berbeda dan satu posisi *analisis*.

1. *Group* yang mengusulkan ide teknologi dan mencari kemungkinan menerapkan suatu teknologi. Pengusul ide teknologi baru umumnya berasal dari perusahaan swasta lokal, nasional, multinasional dan dapat juga berasal dari program pemerintah.
2. *Group* yang berlawanan yang tidak ingin menerapkan suatu teknologi atau setidaknya ingin mendapat kepastian akan keamanan atau keinginan yang ingin dicapai.
3. *Group* yang berada diantara kedua *group* di atas yang berusaha menengahi.
4. *Analisis*, yaitu seseorang yang bisa berdiri di atas perdebatan dan berusaha menjadi seorang analisis yang tidak larut sebagai peserta debat. Posisi ini akan dapat melihat ke bawah dengan tujuan untuk

berusaha mengerti suatu model, fakta, teori yang dikemukakan bersesuaian dengan kepentingan sosial dari masing-masing pihak. Kedua pihak diperlakukan secara simetri sama dan terbuka. Tidak boleh mengasumsikan salah satu kelompok salah dan mengapa yang lain benar. Hal penting yang perlu dibahas adalah menjelaskan dengan seimbang mengapa kedua pihak mempunyai penjelasan yang berbeda.

Perdebatan para ahli akan kemungkinan berada pada beberapa kategori :

1. Ahli yang tidak menyetujui penerapan suatu teknologi tidak saja akan mengemukakan alasan yang jelas, atau yang menjadi preferensi suatu teknologi, tetapi akan mengemukakan data dan fakta pada persoalan tertentu, interpretasi ahli tentang fakta tersebut, pada fakta sendiri, termasuk apakah hal yang dikemukakan tersebut merupakan fakta atau bukan. Semua klaim pada arena politik dapat dikemukakan dan ruang untuk itu terbuka lebar.
2. Ahli yang memposisikan diri di tengah atau ahli yang mempunyai tujuan tertentu, ahli yang memikirkan *outcome*, sehingga ahli ini akan memposisikan diri pada penentang atau penerima suatu teknologi.

Perdebatan pro dan kontra yang meruncing, membuat para ahli mengalami pola pikir terpolarisasi dan dapat digambarkan seperti berikut :

1. Ahli yang membesarkan persoalan atau menggabungkan persoalan sosial menjadi seakan akan persoalan teknik dan memberikan metode perhitungan tanpa memperhatikan sesuatu itu benar atau salah. Persoalan yang dikemukakan seperti halnya ilmiah, objektif dan rasional, tetapi banyak memuat asumsi politis yang tersembunyi.
2. Persoalan teknik secara tidak jelas tercemar dengan persoalan sosial. Pada kondisi ini, para ahli tersebut telah menganalisis tentang pengaruh negatif suatu teknologi digabungkan dengan asumsi, ketidakpastian, tata nilai, kesimpulan yang telah dimasukkan ke dalam analisis. Apabila perhal ini yang terjadi, sebaiknya dipisahkan pendapat ahli tersebut, sehingga persoalan menjadi lebih jernih.
3. Perdebatan mengandung konflik kepentingan, tata nilai serta tujuan dan sangat sulit memisahkan dan menjernihkan persoalan.
4. Sangat mungkin berpikir terbalik tentang pengertian *The power of logic* atau kekuatan (kekuasaan) logika yang seharusnya dipertahankan dengan kesederhanaannya, tetapi membaliknya menjadi *the logic of power* atau membenarkan kekuasaan dengan logika terbalik.

Posisi sebagai ANALISIS sebagai alternatif akan dapat memandang persoalan lebih jernih. Kesimpulan yang didapat dari posisi analisis ini mungkin akan mencengangkan.

1. Bahwa perbedaan pendapat yang terjadi adalah karena perbedaan pandangan dan perbedaan sistem tata nilai yang berkaitan dengan budaya setempat.

2. Bahwa perbedaan pendapat yang terjadi, kemungkinan merupakan permasalahan interes atau kepentingan yang dapat juga merupakan kepentingan politik.
3. Bahwa perbedaan pendapat yang terjadi kemungkinan berkaitan dengan aspek ekonomi dan lapangan pekerjaan.
4. Bahwa suatu teknologi infrastruktur yang dipertentangkan, mungkin ditengarai memberikan pengaruh buruk yang lebih dalam terhadap lingkungan dan masyarakat.

Apabila terungkap perbedaan sebagaimana hal di atas, sangatlah sulit bagi semua pihak dapat mencapai kesepakatan. Hal ini akan menjadi dilema yang harus dihadapi oleh pemegang keputusan. Pemegang keputusan yaitu pemerintah harus berlaku arif, bila perlu berani menunda suatu penerapan teknologi, bila kesepakatan tidak tercapai. Penundaan atau penolakan penerapan teknologi ini bukan semata-mata karena alasan teknik atau teknologi, tetapi karena alasan sosial. Karenanya Fokus Grup Diskusi (FGD) menjadi solusi yang paling elegan.

G. Kontrol pada Pengembangan Teknologi

Tabel 1. Alat kontrol dalam pengembangan teknologi

No	Jenis alat kontrol	Keterangan
1	Harga	Menentukan harga
2	Subsidi	Memberikan subsidi
3	Peralatan	Memberikan bantuan peralatan
4	Pajak	Menaikkan/menurunkan pajak
5	Deklarasi	Melakukan deklarasi
6	Standar Teknis	Menetapkan standar teknis
7	Moratorium	Melarang (waktu tertentu)
8	Diskusi publik	Melakukan diskusi publik
9	Focus Group Discussion (FGD)	Melakukan FGD
10	Lisensi	Memberi lisensi
11	Research and development	Menyiapkan penelitian dan pengembangan
12	Wistle Blower	Pemicu persoalan kejanggalan
13	Protes/Demo	Pergerakan masyarakat

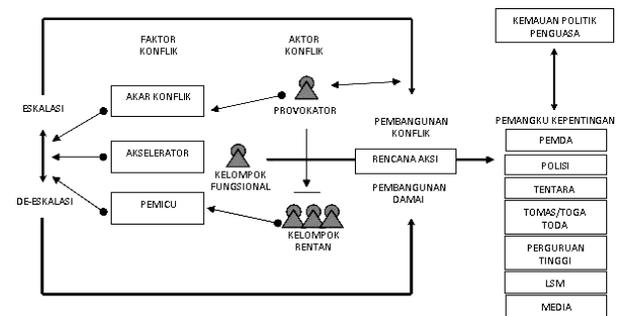
Kontrol teknologi mempunyai tiga paradigma :

1. Pertama, kontrol teknologi mempunyai arti mengantisipasi dan mengurangi pengaruh buruk dari teknologi tersebut. Keseimbangan memerlukan suatu kompensasi, antara biaya dan keuntungan, sehingga proses adaptasi suatu teknologi baru dapat berjalan dengan baik.
2. Kedua, kontrol teknologi mempunyai pengertian tentang menerima atau menolak.
3. Ketiga, bahwa kontrol teknologi dapat diterapkan pada berbagai cara dan berbagai titik pada proses kreativitas dan inovasi teknologi.

Tabel 1 memperlihatkan beberapa alat kontrol teknologi.

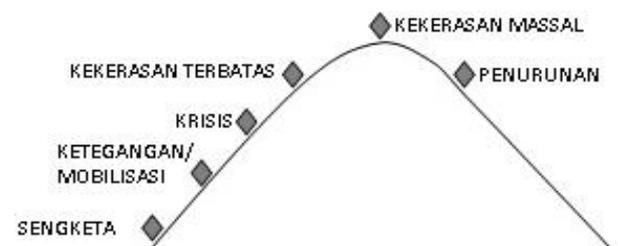
H. Resolusi Konflik

Kerangka dinamis dan pencegahan dan resolusi konflik seperti digambarkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik (Malik dkk, 2014)

Terdapat tiga elemen dalam konflik. Pertama, Pemicu konflik yaitu faktor yang muncul tiba-tiba dalam kejadian konflik dan dianalogkan dengan api. Kedua, elemen akselerator konflik yaitu reaksi-reaksi yang muncul ketika terjadi konflik yang dianalogkan dengan angin panas. Ketiga, elemen akar konflik yaitu suatu latar belakang yang menjadi pra-kondisi konflik atau sumber konflik yang dianalogkan dengan rumput kering.



Gambar 4. Eskalasi konflik (Malik dkk, 2014)

Proses berkembangnya konflik dari konflik yang bersifat ringan sampai konflik yang menghancurkan. Eskalasi konflik dapat dipakai oleh fasilitator perdamaian untuk menentukan intervensi yang tepat. Umumnya dibedakan 5 tahap eskalasi konflik seperti terlihat pada Gambar 4.

Lima tahap eskalasi konflik tersebut adalah: Sengketa, ketegangan/mobilisasi, Krisis, Kekerasan terbatas, Kekerasan massal, dan Penurunan eskalasi konflik. Hal ini semua, kerangka dinamis dan eskalasi konflik, berkaitan dengan etika, moral, aturan, budaya, dan kepentingan sosial. Eskalasi konflik dilawankan dengan de-eskalasi konflik yaitu pembangunan konflik dilawankan dengan pembangunan damai yang pada akhirnya akan sampai kepada pemilihan teknologi tepat guna yang memberi rasa damai kepada masyarakat luas.

I. Pembangunan

Pemerintah Indonesia selalu mendukung dan

berusaha agar pembangunan terus berjalan. Pembangunan tidak boleh mandeg. Pembangunan adalah ukuran kemajuan yang akan menjadi ukuran keberhasilan dari suatu pemerintahan. Secara nalar akan sangat sulit mengatakan hal yang bertolak belakang kecuali mengedepankan pembangunan, pembangunan yang berkelanjutan, tepat guna.

IV. HASIL DAN BAHASAN

A. *Kajian Kelayakan Jalan by Pass Tohpati Kusamba.*

Kajian kelayakan jalan bypass Tohpati Kusamba dilaksanakan pada tahun 2002 (PU Bali dan Universitas Udayana, 2000). Lima hal kelayakan yang ditinjau adalah: Hukum, Sosial Budaya, Lingkungan, Teknis, dan Ekonomi. Kelima hal tersebut dapat disetujui oleh semua pihak dan karenanya tidak menimbulkan persoalan, dalam pembangunannya.

Kajian napak tilas yang dilakukan pada ruas jalan Tohpati-Kusamba (PU Bali dan Universitas Udayana, 2000a) mengungkap beberapa hal: bahwa penduduk yang terkena pengadaan tanah untuk jalan Tohpati-Kusamba yang dipindahkan maupun yang tidak dipindahkan ketempat lain telah melepaskan hak atas tanahnya dan proses ini telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Meskipun ganti rugi atas hak tanah yang dimanfaatkan untuk jalur jalan kurang memuaskan, namun pemegang hak atas tanah tidak berkeberatan mengingat sisa tanah yang masih dimiliki mempunyai prospek yang lebih cerah dimasa mendatang karena keberadaan jalan Tohpati Kusamba.

Secara teoritis sesuai dengan kajian pustaka dapat dilihat bahwa dari awal rencana pembangunan jalan ini tidak menimbulkan pro dan kontra yang tajam. Jalur jalan melewati tanah kosong berupa persawahan dan sedikit tegalan. Perencanaan alignment, lebar jalur dan perkerasan masih dalam kualitas mutu yang direncanakan. Usulan rencana jalan ini sesuai dengan bagan alir teknologi berwawasan budaya (Redana dan Suparsa, 2014). Setelah tujuh belas tahun sejak rencana pembangunan jalan ini dan sampai pada tahapan konstruksi dan tahap pelayanan, jalan masih dapat dikatakan memberikan kemajuan sesuai kriteria kemajuan infrastruktur berkelanjutan.

B. *Kajian Kelayakan Jalan Sunset Road*

Kajian kelayakan ini juga meninjau lima hal yaitu: hukum, sosial budaya, lingkungan, teknis dan ekonomis. Kajian dilaksanakan tahun 1999-2000 (PU Bali dan Universitas Udayana, 2000). Kelima hal tersebut dapat disetujui oleh semua pihak dan karenanya tidak menimbulkan persoalan, dalam pembangunannya.

Kajian napak tilas juga dilakukan pada ruas jalan Sunset Road atau Kuta-Kerobokan (PU Bali dan Universitas Udayana, 2000a). Beberapa hal dapat disimpulkan antara lain: bahwa pelepasan hak dan ganti rugi atas tanah yang terkena jalur jalan Kuta-Kerobokan telah dilakukan dengan baik oleh

pemerintah. Pemerintah agar berlaku transparan dan akuntabel dalam segala proses pengadaan tanah maupun penataan tanah LC (land consolidation) untuk menjaga *trust* atau kepercayaan masyarakat. Pemerintah agar mengadopsi aspirasi-aspirasi masyarakat dalam mempercepat proses pelepasan hak atas tanah dan semua hal ini telah dilaksanakan dengan baik pada proyek jalan sunset road.

Usulan rencana jalan ini juga sesuai dengan bagan alir teknologi berwawasan budaya (Redana dan Suparsa, 2014) dan tidak menimbulkan konflik pro-kontra yang tajam. Setelah tujuh belas tahun sejak rencana pembangunan jalan ini dan sampai pada tahapan konstruksi dan tahap pelayanan, jalan masih dapat dikatakan memberikan kemajuan sesuai kriteria kemajuan infrastruktur berkelanjutan.

C. *Kajian Kelayakan Bendungan Bawah Tanah*

Kajian ini dilaksanakan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2012/2013. Pada waktu pengeboran untuk mendapatkan sample tanah, masyarakat sudah mempersoalkannya dengan mengatakan bahwa sesungguhnya yang dicari adalah kandungan emas. Beberapa kali menjadi tulisan di Koran lokal, karenanya harus dilakukan penyelesaian masalah.

Saran yang dilaksanakan adalah melaksanakan focus group discussion/FGD di lingkungan desa yang mempersoalkan pekerjaan tersebut dengan menyebarkan angket dengan arah menyetujui atau menolak pekerjaan tersebut. Semua anggota masyarakat menyatakan menolak dengan membubuhkan tanda tangan. Dengan demikian pekerjaan tersebut tidak dilanjutkan lagi. Sesuai dengan bagan alir teknologi berwawasan budaya (Redana dan Suparsa, 2014), usulan infrastruktur bendungan bawah tanah ini tidak dilanjutkan.

D. *Kajian Kelayakan Reklamasi Teluk Benoa*

Kajian reklamasi teluk benoa mendapat penolakan dan tidak mendapat persetujuan masyarakat. Akar konflik adalah terbitnya Perpres no 51 tahun 2014 tentang kawasan reklamasi teluk benoa. Perpres ini berlawanan dengan keinginan masyarakat atau hak legal dalam hal ini aturan/perpres berlawanan dengan hak natural masyarakat, yang seharusnya secara moral, hak natural masyarakat dikedepankan.

Konflik sudah berada pada level kekerasan terbatas antara pihak yang berkonflik berdasarkan kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik, dan eskalasi konflik (Malik, dkk, 2014). Berdasar pada bagan alir teknologi berwawasan budaya (Redana dan Suparsa, 2014) dan berdasar hasil FGD yang menolak reklamasi teluk benoa dan menimbulkan konflik pro-kontra yang tajam, kajian kelayakan reklamasi teluk benoa secara etika, moral dan budaya menjadi tidak layak. Tahun 2014-2017 masih terjadi demo atau pengerahan massa penolakan reklamasi dengan memasang spanduk tolak

reklamasi. Pemegang keputusan/pemerintah menghadapi dilemma moral, oleh karenanya keputusan yang paling bagus adalah mengusulkan infrastruktur lain selain reklamasi yang dapat diterima masyarakat misalnya kawasan hutan bakau atau wisata air.

E. Kajian Tren Konflik di Taman Nasional

Kajian tren konflik di lima taman Nasional 2009-2014 dilakukan oleh Malik, dkk (2014). Tren konflik dari lima taman nasional di Indonesia yaitu taman nasional Tesso Nilo, Kerinci Seblat, Kayan Mentarang, Kutai dan Sebangau merupakan gambaran konflik lahan dan sumber daya hutan. Selama tahun 2009-2014, 53% kejadian konflik berada pada level ketegangan atau mobilisasi karena konflik sudah termanifestasi dalam bentuk aksi yang menimbulkan tensi atau bahkan kekerasan antara kubu yang berseteru.

Akar konflik kehutanan pekat dengan isu kepentingan dan diikuti oleh isu struktural atau tata kelola pemerintah. Aktor konflik adalah cukong, LSM Nasional, dan pemerintah dusun yang ditengarai berperan menjadi provokator dalam konflik yang terjadi. Masyarakat umum menjadi kelompok yang rentan, kelompok rentan lainnya adalah hasil hutan dan satwa hutan.

Hasil studi merekomendasikan beberapa hal, antara lain: perlu melakukan pencegahan konflik, perlu ada pembenahan pada tata pemerintahan dalam system kehutanan, perlu mengutamakan model pengelolaan kolaboratif antara semua pihak demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

V. PENUTUP

Kajian ini menyimpulkan dan menyarankan beberapa hal:

1. Tren konflik
 - a. Tren konflik yang terjadi pada pembangunan jalan Tohpati Kusamba dan Sunset Road tidak mengalami eskalasi konflik yang berarti, karenanya pembangunan jalan ini boleh dikatakan sangat berhasil. Pembangunan jalan Tohpati Kusamba dan Sunset Road yang dari awal sudah diterima oleh masyarakat, tidak mengalami konflik yang kelam. Setelah sepuluh tahun infrastruktur jalan ini dimanfaatkan oleh masyarakat, masih menyiratkan kemajuan sesuai rencana awal.
 - b. Tren konflik yang terjadi pada kajian bendungan bawah tanah masih pada tahap penyelidikan untuk kajian kelayakan sudah ditolak masyarakat dan tidak dilanjutkan lagi. Faktor dan aktor konflik tidak perlu dibahas lagi.
 - c. Tren konflik yang terjadi pada studi kelayakan Teluk Benoa masih pada tahap kajian yang sudah menyatakan tidak layak dan tidak dilanjutkan lagi. Faktor dan aktor konflik tidak perlu dibahas lagi.
 - d. Konflik yang terjadi pada kawasan kehutanan, tren konflik di taman nasional menyiratkan penyelesaian setelah pelaksanaan konstruksi,

tindakan pencegahan sudah sangat terlambat dan masyarakat telah menjadi korban rentan, korban rentan lainnya adalah hasil hutan dan satwa hutan. Faktor dan aktor konflik semakin mencuat dan tentu akan menjadi konflik berkepanjangan.

2. Penanganan konflik dengan nilai sosial budaya
 - a. Konflik yang terjadi pada kajian kelayakan bendungan bawah tanah masih pada tahap kajian kelayakan, dan secara sosial budaya ditolak oleh masyarakat, karenanya tidak dilanjutkan lagi.
 - b. Konflik yang terjadi pada kajian reklamasi teluk benoa belum pelaksanaan infrastruktur, tindakan pencegahan masih bisa dilakukan dengan merencanakan infrastruktur yang bisa diterima masyarakat seperti kawasan hutan bakau. Satu syarat kajian yaitu sosial budaya tidak memenuhi syarat, sudah sangat kuat alasan untuk tidak melanjutkan infrastruktur reklamasi teluk Benoa.
 - c. Konflik yang terjadi pada kawasan kehutanan sebaiknya diselesaikan dengan nilai sosial budaya.
3. Mengedepankan posisi sebagai analis

Kajian ini dilaksanakan dengan posisi sebagai analis, dan sama sekali lepas dan bebas dari pro dan kontra. Hal ini dilakukan agar dapat melakukan analisis dengan objektif.
4. Mengedepankan tata nilai etika dan moral
 - a. Moral atau nilai moral, nilai etika harus dipakai dasar dalam mengambil keputusan.
 - b. Budaya terutama budaya lokal harus dikedepankan untuk mendapatkan teknologi tepat guna atau infrastruktur berkelanjutan tepat guna.

DAFTAR PUSTAKA

- Baark, E., & Jamison, A., 1986, In E. Baark & A. Jamison (Eds.), *Technological Development in China, India and Japan*, St. Martin's Press, New York, hlm. 1-34.
- Blackburn, Simon., 1996, *The Oxford Dictionary of Philosophy*. Oxford University Press. New York.
- McLean Iain., 1996, *The Concise Oxford Dictionary of Politics*. Oxford University Press, NY.
- Malik, Ichsan, Putri Kitnas Inesia, Rolly Leatemia., 2014, *Tren Konflik di Lima Taman Nasional 2009-2014, Tesso Nilo, Kerinci Seblat, Kayan Mentarang, Kutai, Sebangau, REDD Plus*, Jakarta
- PII., 2015, *Persatuan Insinyur Indonesia: Materi Pelatihan Program Pembinaan Profesi Insinyur/PPPI 7 Juni 2015*, Denpasar, Bali
- PU Bali dan Universitas Udayana., 2000, *Kajian Kelayakan Jalan Kuta-Kerobokan*.
- PU Bali dan Universitas Udayana., 2000, *Studi Napak Tilas (Tracer Study) Proyek pembangunan Jalan Tohpati-Kusamba dan Kuta-Tanah Lot*.
- Redana, I Wayan, I Gusti Putu Suparsa., 2014, *Pengantar Teknologi Berwawasan Budaya*. Udayana University Press, Denpasar.



Suriasumantri, Jujun S., 2000, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Cetakan XIII, Sinar Harapan, Jakarta.